



# Dilarang Masuk, Pedagang Sobek Undangan



**KARENA TAK BOLEH MASUK:** Sejumlah pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma menyobek undangan resmi terkait sosialisasi dan diskusi relokasi, di depan Kantor UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja, kemarin (1/10). Foto kanan, salah seorang pedagang saat berorasi menyampaikan aspirasinya.

Kepala UPT:  
Itu Tidak Etis

teras  
malioboro



**EKWANTO**  
Kepala UPT Pengelola  
Kawasan Cagar Budaya  
Kota Jogja

**JOGJA** - Polemik proses relokasi pedagang Teras Malioboro (TM) 2 dengan pemerintah, makin meruncing. Kemarin (1/10) pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma mendatangi Kantor UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja dan terang-terangan menyobek undangan resmi berkaitan sosialisasi dan rembuk relokasi.  
*Baca Dilarang... Hal 7*



# Dilarang Masuk, Pedagang Sobek Undangan

Sambungan dari hal 1

Dalam pemantapan sosialisasi tahapan relokasi, pihak UPT sengaja mengundang beberapa pedagang untuk datang ke kantornya. Undangan itu bersifat terbatas, namun bertahap dan setiap pedagang diundang dalam waktu dan jumlah yang berbeda.

Menanggapi hal itu, staf Divisi Advokasi LBH Jogja yang menjadi kuasa hukum Paguyuban Tri Dharma Muhammad Raka Ramadhan mengatakan, kedatangan Paguyuban Tri Dharma untuk merespons adanya surat undangan itu. Dalam undangan disebutkan, agenda pertemuan hanya di-tuliskan sosialisasi dan rembuk pedagang TM 2.

"Kami tidak tahu substansinya, apakah terkait sampah, listrik, atau relokasi. Yang jelas kami datang ke sini untuk menanyakan hal tersebut," ujarnya saat ditemui di depan

Kantor UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja, kemarin (1/10).

Namun alih-alih mendapatkan respons dari kepala UPT, Anggota Paguyuban Tri Dharma malah dilarang masuk dan dihardik oleh aparat keamanan. Perwakilan dari kantor UPT pun tidak ada yang keluar dan menemui mereka. "Dari kami perkinan ada 100-200 pedagang yang datang," tuturnya.

Raka menyadari, undangan yang diberikan memang secara personal ditujukan ke beberapa pedagang di lorong TM 2, termasuk anggota Paguyuban Tri Dharma. Karena merasa tidak digubris oleh pihak UPT, para pedagang lantas menyobek undangan itu di depan Kantor UPT bersama-sama.

"Ini untuk simbolis. Begitu pun dengan undangan-undangan ke depan, kalau ada undangan kami abaikan," tandasnya.

Salah seorang anggota Pa-

guyuban Tri Dharma Shinta Septiani, sebagai bentuk protes ia membacakan surat ORI DIJ yang ditujukan kepada Pj Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto. Surat itu diterbitkan Senin (30/9) pascaperwakilan Paguyuban Tri Dharma melakukan audiensi dengan ORI.

"Saat ini kami sedang merumuskan hasil akhir pemeriksaan laporan Arif Usman dik terkait perencanaan dan proses relokasi pedagang TM 2," teriak Shinta saat membaca isi surat ORI DIJ.

Dalam surat itu, ORI salah satu poinnya menyebut sosialisasi rembuk pedagang TM 2 oleh Pemkot Jogja dinilai pedagang Paguyuban Tri Dharma tidak jelas agendanya. Maka dari itu mereka menuntut proses relokasi dihentikan sementara sampai ada kesepakatan pelibatan pedagang.

Terpisah, Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja Ekwanto menang-

gapi adanya polemik dengan menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan dengan pedagang merupakan proses pemantapan dalam tahapan relokasi jilid dua.

Dalam pertemuan itu, pihaknya menyampaikan secara detail hal-hal yang berkaitan dengan gambaran tata ruang tempat relokasi di Kerotan dan Beskalan. "Kami perlihatkan gambarnya, pintunya ada, berapa, lapaknya, dan sebagainya," ujarnya.

Ia membenarkan bahwa beberapa pedagang tidak diperbolehkan masuk ke ruangan. Ekwanto berdalih karena pertemuan para pedagang telah dijadwalkan sesuai dengan hari dan tanggalnya.

"Jadi sesuai tanggalnya masing-masing, jangan memaksakan diri. Dan yang boleh masuk adalah pedagang yang membawa undangan hari ini (kemarin, Red). Selain itu ya tidak boleh masuk," tuturnya.

Hari itu UPT mengundang sekitar 70 pedagang untuk sosialisasi. Adanya pembatasan jumlah itu karena ruang dan kursi di Kantor UPT terbatas. Menurutnya, para pedagang yang tidak diperbolehkan masuk memang memang undangan, namun jadwal pertemuannya bukan hari itu.

"Sebelumnya berkali-kali mereka (Paguyuban Tri Dharma) kami undang, namun berkali-kali tidak mau datang," jelasnya.

Ia menyebut pentolan Paguyuban Tri Dharma malah tidak menyebarluaskan un-

dangan-undangan yang ia kirim. Beberapa di antaranya malah membujuk pedagang lain untuk mengabaikan undangan-undangan dari pemerintah melalui UPT. "Kandidat boleh seperti itu. Ini malah semacam bentuk makar," tegasnya.

Menurutnya, proses validasi yang dijalankan pihak UPT bertujuan untuk update data berkaitan pemilih lapak, apakah masih hidup atau meninggal. Namun berdasar perintah Gubernur Hamengku Buwono X untuk meninggalkan

pihak yang tidak mau direlokasi. "Otomatis kalau gak mau (relokasi) kami tidak memaksa. Kami juga tidak rugi kalau mereka tidak mau," tandasnya.

Ekwanto menyebut pedagang yang sudah menandatangani persetujuan relokasi sekitar 500 pedagang lebih. Ia juga menyebut banyak pedagang yang telah siap, namun takut diintimidasi (oleh pedagang yang kontra). "Nyobek surat dari pemerintah itu kan juga sangat tidak etis," katanya. (oso/laz/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005